



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan untuk selanjutnya diverifikasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2017 S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juli 2018

GUBERNUR RIAU,



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



AHMAD HLJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 43



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jln. Jenderal Sudirman No. 460, Telp. (0761) 45505, Fax. (0761) 45507
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.89/Diskominfotik/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi perencanaan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

KEDUA : Mengangkat pejabat dan nama-nama berikut untuk duduk dalam tim dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum pertama terdiri dari :

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KEEMPAT : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagaimana dimaksud diktum kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Melakukan asistensi mulai dari persiapan sampai selesai sehingga Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran yang diharapkan terhadap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
2. Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan Persiapan Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Menyusun Agenda Kerja Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - c. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
3. Sekretaris :
 - a. Mempersiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan dalam Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
4. Anggota :
 - a. Membantu semua proses Persiapan Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Januari 2018

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Kepala,



Ir. H. YOGI GETRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199303 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 Nomor : Kpts.89/Diskominfotik/I/2018
 Tanggal : 23 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2019 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. H. Yogi Getri	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Hj. Lili Irianti, BA	Sekretaris	Ketua
3	Jefri Herimen	Kasubbag Perencanaan Program	Sekretaris
4	Erisman Yahya, MH	Kabid Informasi & Komunikasi Publik	Anggota
5	Hasmuri Hasan. S.I.Kom, MM	Kabid Pengelolaan Infrastruktur e-Government	Anggota
6	Ekki Gaddafi, S.Kom, M.Kom	Kabid Layanan e-Government	Anggota
7	Drs. Farida Hanum, MM	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8	Yuspi, S.IP	Kepala Bidang Persandian	Anggota
9	Dra. Mailince, M.Si	Kasubbag Kepegawaian & Umum	Anggota
10	Hafzam	Kasubbag Keuangan, Perlengkapan & Pengelolaan BMD	Anggota
11	Ir. Lilih Dahliati	Fungsional Arsiparis Muda	Anggota
12	Mukhlizar, SE, M.Si	Staf Subbag Perencanaan Program	Anggota
13	Syafrian Hasan, S.Sos, M.Si	Staf Subbag Perencanaan Program	Anggota
14	Feri Setiawan, S.E	Staf Subbag Perencanaan Program	Anggota
15	Muliady Simbolon	Staf Subbag Perencanaan Program	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK
 PROVINSI RIAU,**



H. H. YOGI GETRI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650916 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya RENJA 2019 dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2019.

Pekanbaru, Juni 2018

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika
dan Statistik Provinsi Riau



Ir. H. YOGI GETRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN GUBERNUR RIAU	iv
KEPUTUSAN KEPALA DINAS	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-8
C. Maksud dan Tujuan	I-10
D. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK TAHUN 2017	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..	II-22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2019.....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RENSTRA.....	II-4
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Bidang KOMINFOTIK.....	II-21
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD.....	II-22
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	II-29
Tabel 2.5	Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	II-39
Tabel 3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah tersebut di atur sesuai PP No 8 Tahun 2008 dan Permendagri No 54 Tahun 2010 dan diperbaharui dengan Permendagri No 86 Tahun 2017

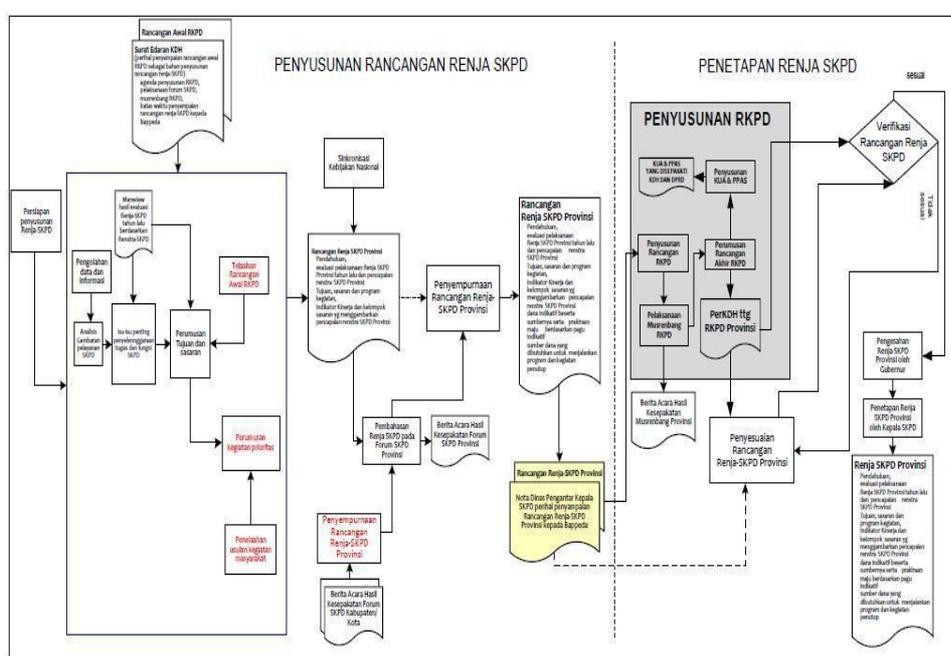
dengan beberapa tahapan, yaitu Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana.

Secara hierarki penyusunan rancangan Renja OPD merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan OPD. Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Penyusunan Renja OPD yakni: persiapan penyusunan Renja OPD, tahap penyusunan

rancangan Renja, Pelaksanaan forum OPD dan tahap penetapan Renja OPD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja OPD sesuai PP No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu : Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja OPD terlihat seperti gambar berikut ini :



Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mencapai prioritas pembangunan seperti yang tercakup dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau pada tahun 2019. Dalam penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2019, Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2017) dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2018) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode 2014-2019.

Dalam rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019, tidak terlepas dan mengacu kepada Rencana Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang fokus membangun Sektor Telekomunikasi, Tata Kelola Internet, dan Digitalisasi Siaran Televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau pada tahun 2019, mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2019, terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan serta isu strategis daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan;
- 3) Peningkatan Ekonomi Berdaya Saing serta Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dan
- 5) Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan.

Dalam mewujudkan sasaran strategis ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah dipusatkan pada sektor

infrastruktur jaringan yang menjangkau daerah pedesaan, sehingga masyarakat desa dapat mengakses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan layanan aparatur kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Globalisasi ekonomi masyarakat melalui peningkatan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman dengan promosi produk masyarakat daerah melalui sarana publik di media yang difasilitasi baik oleh pemerintah daerah provinsi yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat mendorong peningkatan Ekonomi Berdaya Saing serta Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan dapat dijangkau dengan mudah ini merupakan inti dari pemangkasan birokrasi melalui media broadband nasional, internet dan penyiaran digital merupakan salah satu jalan menuju reformasi dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan guna mencapai good government dan clean government.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 yaitu:

"Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing "

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tersebut di atas yaitu:

1. *Layanan Komunikasi dan Informatika adalah* pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :
 - *Pembangunan Infrastruktur* (Penyediaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas serta layanan informasi dan komunikasi yang mendukung ekonomi masyarakat di Provinsi Riau)
 - *Pembangunan Suprastruktur* (yang difokuskan kepada Pengembangan dan Kelembagaan Kelompok Informasi Sosial agar memiliki kesiapan untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah disediakan dan mendayagunakan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat),
 - *Pembangunan infostruktur* (Penyediaan konten positif yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan meningkatkan nasionalisme masyarakat).
2. *Handal* adalah penyelenggaraan pelayanan yang aman, nyaman, faktual, cepat, tepat, transparan, dapat dipercaya dan diandalkan serta efektif dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

3. *Berdaya saing* adalah Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya,tatanan sosial yang agamis

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mengujudkan visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2019

1.2 LANDASAN HUKUM

Berikut payung hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2019 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 juncto Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
8. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;

10. Peraturan Gubernur Riau No. 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
11. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019.
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah:

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau .
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMINFOTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2017 dan Capaian Renstra OPD

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kualitatif, sedang data kuantitatif merupakan proses dari pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri.

Berikut ini dipaparkan beberapa tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di

sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.

- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017 yang mempertimbangkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan

Renja Tahun ke lima dalam periode Renstra 2014-2019, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel III.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sampai dengan tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2019 Provinsi Riau Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016 (Tahun n-4)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu /Tahun 2017 (Tahun n - 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)/n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017 (n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan /Tahun 2018 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.25	URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMASI									
	BELANJA LANGSUNG									
1.25.1.25.01.19	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	15288	orang	2340	2566	774	46	2750	
	Kegiatan :									
	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta pelatihan	900	orang	150	50	90	1,80	40	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diseminasi Informasi Daerah Terisolir	Jumlah peserta diseminasi	800	orang	100	100	500	5	200	800	1,0
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah anggota kelompok	955	orang	300	50	320	6,4	60	680	0,7
Pembelajaran internet Sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Prov. Riau	Jumlah peserta pembelajaran	5560	orang	880	125	1405	11,24	0	2285	0,4
Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kab/Kota	Jumlah aparatur PPID yang memahami KIP/jumlah kab/kota yang dimonitoring	400	orang	450	125	345	2,76	170	965	2,4
Peningkatan Layanan Kesekretariatan dan Ajudikasi Komisi Informasi d Provinsi Riau	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memahami Keterbukaan informasi publik	1150	orang	300	200	200	1	0	500	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan Media Center Daerah	Jumlah Petugas media center	72	orang	30	32	40	1,25	8	78	1,1
Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalist)	Jumlah peserta workshop jurnalist	725	orang	120	80	140	1,75	60	320	0,4
Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat	Jumlah peserta Pembelajaran	2400	orang	180	180	950	5,28	170	1300	0,5
Deseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi kepada masyarakat	96	kali	40	32	72	2,25	40	152	1,6
Literasi Media	Jumlah masyarakat dan aparatur memahami komunikasi informatika	2750	orang	0	2750	2750	1,00	2750	5500	2,0
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah kerjasama dengan media masa	255	kali	1	27	27	0	1	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan :										
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga komunikasi	165	kali	10	10	24	2,4	13	47	0,28
Dialog Interaktif Melalui Media Televisi lokal	Jumlah dialog	90	kali	18	17	30	1,76	13	61	0,68
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah Desa/ SKPD Pemprov Riau yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika	1148	desa / 51 SKPD	0	90	0		42	42	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah jaringan yang terpasang dan yang dipelihara	51	jaringan	54	54	156	2,89	51	261	5,12
Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah bandwidth akses internet/ waktu pelayanan akses internet	500	Mbps	12 bulan/50 Mbps	12 bulan/51 Mbps	12 bulan	100,00	500	524	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembangunan Command Centre Provinsi Riau	Jumlah command center	1	unit	1	1	2	2	1	4	4,00
Pembangunan Data Center Provinsi Riau	Jumlah data center	1	data center	0	1	1	1	1	2	2,00
PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ jumlah aplikasi yang terintegrasi	12	aplikasi	2 aplikasi	30 aplikasi		0	2,6	2,6	
Kegiatan :										
Pengembangan E-Government Provinsi Riau	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	12	aplikasi/ 51 SKPD	4	4	9	2,25	1	14	1,17
Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian E-government di SKPD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah SKPD yang dievaluasi aplikasi e-government	51	SKPD	51	51	102	2	51	204	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bimbingan teknis bagi Administrator Pengelola e-government pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta bimtek	260	orang	80	80	180	2,25	100	360	1,38
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	56	layanan	44	47			1	1	
Kegiatan :										
Pengelolaan website riau.go.id	Jumlah website resmi pemprov Riau yang dikelola	1	website	1	1	3	3	1	5	5,00
Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dikelola	1	website	1	1	3	3	1	5	5,00
Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau	Jumlah peserta bimtek PPID	51	PPID	100	51	53	1,04	51	204	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Layanan informasi melalui media center	Jumlah bilik media center yang dikelola/ Jumlah website media center yang dikelola	2 bilik /	1 website	2	2	6	3	2	10	10
Newsroom Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Berita yang dihasilkan	42329	berita	11680	11680	11680	1	11680	35040	0,83
Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran	12	kali	1	1	4	4	2	7	0,58
Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional	Jumlah peserta PIN Jumlah acara yang diikuti	159 orang	/25 acara	30	15	56	3,73	30	116	0,73
Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah acara yang didokumentasikan	200	acara	50	240	500	2,08	100	650	3,25
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	% pelayanan komisi informasi Provinsi Riau terlaksana dgn baik	100	persen	100	100	300	3	100	500	5,00
Penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi/ mediasi di luar Pekanbaru	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan mediasi	11	kab/kota	12	12	25	2,08	2	39	3,55
Layanan Informasi Publik melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruangan	Jumlah publikasi	100	publikasi	50	100	25	0,25	25	100	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau	Jumlah peserta seleksi anggota KIP	5	orang	5	5	10	2	0	15	3,00
Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah publikasi kelembagaan KIP	90	kali	400	400	800	2	400	1600	17,78
Pengembangan Studio Editing Multimedia	Jumlah jenis peralatan studio editing yang diadakan	37	jenis	2	1	1	1	0	3	0,08
Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah publikasi melalui media online Diskominfo Prov. Riau	180	publikasi	50	100	102	1,02	2	154	0,86
Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau	Jumlah penguatan lembaga penyiaran	12	kab/kota	50	50	50	1	0	100	8,33
Penyediaan Layanan Taman Pintar	Jumlah taman pintar	10	unit	20	17	22	1,294	5	47	4,70
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen	51	paket	51	51	94100	0		28085	
Kegiatan :										
Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau	Jumlah data yang diupdate	70000	data	58000	58000	60000	58000	60000	178000	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Identifikasi, Sinkronisasi dan Integrasi Data dan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah se Provinsi Riau	Jumlah kelompok data yang diidentifikasi	8	kelp data	8	12	60000	12	60000	120008	15001
Bimbingan Teknis pengelola data pembangunan dan data spasial (geografis) bagi aparatur unit kerja/instansi terkait pemerintah daerah se Provinsi Riau	Jumlah peserta bimtek yang memahami pengolahan data	269	orang	80	80	80	80	0	160	0,59
PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	Persentase jasa titipan dan provider yang mematuhi peraturan		100%		20%	#REF!			20%	
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekom di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/kota yang dibina bidang pos dan	12	Kab/Kota	12	12	0	12	0	12,00	1
Workshop jasa titipan dan jasa provider	Jumlah peserta wrokshop dan sertifikasi jasa titip	600	orang	200	150	150	150	0	350,00	0,58
Perlombaan dan pameran Filateli	Jumlah pameran	6	kali	1	4	4	4	0	5,00	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase capaian sistem laporan kinerja dan keuangan yang meningkat		1	0,1	0,1	0,1	0,1	10%	0,1	
Kegiatan :										
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja	600	eksemplar	75	60	65	1,08	65	205	0,34
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran	200	eksemplar	20	20	15	0,75	15	50	0,25
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun	200	eksemplar	20	20	40	2,00	10	70	0,35
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen renja	600	eksemplar	90	40	55	1,38	55	200	0,33
Rapat Koordinasi pada Setiap SKPD	Jumlah peserta Rakor SKPD	640	orang	80	80	80	1,00	80	240	0,38
Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD	Jumlah dokumen revisi renstra SKPD	1	dokumen	60	25	0	0,00	0	60	60,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase laporan sistem laporan kinerja dan keuangan yang meningkat	12	kab/kota	0	12	12	1,00	12	24	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		1	0,48	0,48	0,48	0,48	48%	0,48	
Kegiatan :										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang diadakan	6105	buah	1250	1120	4225	3,77	1450	6925	1,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu berlangganan telfon	12	bulan	12	12	12	1,00	12	36	3,00
Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/ operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas	12	bulan	12	12	12	1,00	12	36	3,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan kantor	30	jenis	47	35	12	0,34	41	100	3,33
Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	12	bulan	12	12	12	1,00	12	36	3,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan	20	item	800	12	12	1,00	15	827	41,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan alat listrik dan penerangan	12	bulan	12	12	12	1,00	12	36	3,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang diadakan	6000	eksemplar	8640	8640	23624	2,73	9560	41824	6,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	40472	kotak	8443	9310	5963	0,64	5963	20369	0,50
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	waktu pelaksana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan	12	12	12	1,00	12	36	3,00
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga PTT dan k2	48	orang	24	24	72	3,00	24	120	2,50
PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja		100%	20%	20%		20%	20%	20%	
Kegiatan :										
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	gedung	1	1	1	1	1	3	3,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu pemeliharaan peralatan kantor	12	bulan	12	12	12	1	12	36	3,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	30	jenis	32	32	21	0,66	21	74	2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang didukung sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja	10 aplikasi & 5 ruangan		0	0	0	0	10	10	1,00
PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur yang mendapat teguran/ sanksi		100%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
Kegiatan :										
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan	580	stel	140	130	450	3,46	220	810	1,40
Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian melayu yang diadakan	530	stel	140	130	130	1,00	0	270	0,51
Pakaian olahraga dan perlengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang diadakan	250	stel	140	0	0	0,00	160	300	1,20
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat		1	0,07	0,07	7 %	0,07	7%	0,07	
Kegiatan :										
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat	240	orang	36	2	32	16,00	32	100	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah pembinaan	290	kali	55	55	60	1,09	60	175	0,60
Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	8500	orang	2000	2000	1500	0,75	1500	5000	0,59
PROGRAM : PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA										
Kegiatan :										
Verifikasi Faktual pra EDP dan EDP (Evaluasi Dengar Pendapat)	Persentase Layanan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	12	Kab/Kota	0	12	12	1,00	12	24	2,00
PROGRAM : PENINGKATAN KETATALAKSANAAN										
Kegiatan :										
Penguatan Organisasi KPID	Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas	10	lembaga	0	10	10	1,00	10	20	2,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM : PENINGKATAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan :										
Pengawasan Perizinan TV dan Radio	Jumlah lembaga penyiaran yang mentaati peraturan perundang- undangan tentang penyiaran	60	kegiatan	0	23	12	0,52	25	37	0,62
Pengawasan Langsung Siaran TV Kabel 12 Kab/Kota	Jumlah lembaga penyiaran yang mentaati peraturan perundang- undangan tentang penyiaran	60	kegiatan	0	23	12	0,52	25	37	0,62
PROGRAM : KERJASAMA ANTAR LEMBAGA										
Kegiatan :										
Diskusi Ahli	jumlah kerjasama yang dapat di kembangkan stakeholder terkait	5	kerjasama	0	5	5	1,00	5	10	2,00
PROGRAM : PENATAAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN										
Kegiatan :										
Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Cinta Siaran Indonesia (KCSI)	Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga penyiaran yang terlibat	5275	orang	0	975	1000	1,03	100	1100	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI										
Kegiatan :										
Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Persentase penyajian informasi 9 data dasar yang up to date	1	kegiatan	0	1	1	1,00	25%	1,25	1,25
Penyusunan Data Statistik Provinsi Riau	Tersusunnya Data Statistik Provinsi Riau	4	data	0	4	4	1,00	4	8	2,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Diskominfotik Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Diskominfotik Provinsi Riau yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi komunikasi, informatika statistik dan persandian yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Kominfotik Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Diskominfotik Provinsi Riau ke depan, baik

pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Diskominfo Provinsi Riau itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019. Adapun Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait Bidang Kominfotik

Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Terwujudnya good government dan clean government

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014–2019 dapat diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017.

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015 n-2	Tahun 2016 n-1	Tahun 2017 n	Tahun 2018 n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai e-government Provinsi Riau			2,45	2,6	2,65	2,75	-	-	2,6	2,65	
2.	Nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau			39,36	42,91	44,5	46,45	30,569	34,13	42,91	44,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Diskominfotik Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD yang berkaitan dengan :

2.3.1 Kebijakan Pembangunan Komunikasi dan Informatika:

1. Menyusun aturan (Pergub) agar master plan e-gov menjadi acuan seluruh OPD untuk membangun Teknologi Informasi (TI) agar terintegrasi dan memudahkan pengelolaannya.
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (E-Office) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem

Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan keterbukaan;

- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan e-government. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau menjadi sandaran berpijak bagi Diskominfo Riau berinovasi mengembangkan TI di Pemerintah Provinsi Riau.
- 2. Membangun fasilitas sebuah data center berstandar internasional yang mengkonsolidasikan seluruh perangkat TI di tiap-tiap OPD. Namun setakat ini masih dalam tahap pembangunan perangkat TI, karena untuk skala internasional gedung belum mencukupi, dan prangkat hardware berupa mesin ginset belum dimiliki.
- 3. Penyusunan kebijakan/aturan tata kelola TI, uraian jabatan dan tugas organisasi pengelola TI dan pemenuhan kebutuhan SDM untuk mengelola layanan TI dengan baik.
- 4. Membangun aplikasi yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD. Diskominfo telah membangun aplikasi mantra yang dapat mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di seluruh OPD dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- 5. Membuat SE Gubernur Riau dan memberikan pelatihan kepada seluruh OPD untuk penggunaan e-office di setiap OPD Provinsi dan Kab/kota se Provinsi Riau dengan Surat Edaran

Nomor : 555/Diskominfotik.UP/III/2015/55.04, perihal Penerapan e-government Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Diskominfotik turun langsung ke OPD yang mengalami gangguan berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-office.

6. Menyajikan data/informasi yang bermanfaat melalui website Pemprov Riau dan OPD dengan menyediakan situs yang kontennya menyangkut pembangunan dan potensi Provinsi Riau yaitu website riau.go.id, diskominfotik.go.id dan mediacenter.riau.go.id sebagai media informasi bagi masyarakat Riau khususnya dan masyarakat di seluruh indonesia umumnya.
7. Penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi masyarakat
 - Melalui sebuah wadah bilik media center disediakan jaringan internet yang gratis bagi masyarakat yang berkunjung di bilik ini. Tahun 2017 jumlah pengunjung tercatat mencapai 12514 orang pengunjung. Para kuli tinta dari beberapa media baik media cetak maupun media online dapat mengupload berita melalui bilik ini. Seperti wartawan dari media, nusapos.com, potretnews.com, CNN indonesia, bermadah.com, sigap.com, genius, narapos, riaupos, haluan riau, rtv, dan radar.
 - Taman pintar suatu program yang menyediakan hotspot

disejumlah titik di Kota Pekanbaru. Seperti Purna MTQ, Taman Kota Aryaduta, Taman Baca Kayu Putih, RTH Integritas, dan Taman PCR Rumbai.

8. Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan media TV stereaming.riau.go.id dan radio. Menyediakan playanan informasi melalui media televisi dan radio yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Riau. Media ini notabennya peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang terdiri dalamnya UKM media sebagai ajang promosi produk masyarakat lokal.
 - KIM yang telah dibina oleh Diskominfo sebanyak 42 kelompok, mereka sudah terdaftar secara nasional namun masih ada di Kabupaten yang belum terdaftar sebanyak 40 kelompok baru mulai didata oleh Diskominfo.
9. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat melalui pelatihan bidang komunikasi, informatika, statistik dan sandi
10. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan TIK karena TIK terus berkembang sehingga kita harus mengikuti lajunya perkembangan IT. Tenaga IT kita latih di inixindo dan PT. Pilar Yogyakarta agar Diskominfo selalu eksis

mengikuti lajunya perkembangan TI.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur di bidang TIK
3. Kesenjangan digital di wilayah Provinsi Riau (ketidakseimbangan pertumbuhan TIK)
4. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Provinsi Riau berbasis teknologi informasi
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
6. Masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID
7. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi dan sarana prasarana komunikasi
8. Belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik

2.3.3 Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu

2014-2019 antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan e-government di OPD Pemprov Riau melalui penyediaan infrastruktur TIK, SDM, dan Aplikasi. Dengan telah menjalankan kebijakan pembangunan

Diskominfo Provinsi Riau di berbagai sektor program untuk percepatan perkembangan isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau.

2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi membentuk aplikasi lapor.riau.go.id, dan PPID yang dapat menampung aspirasi dan pusat informasi masyarakat.
3. Optimalisasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan publik.

Dengan telah menjalankan kebijakan pembangunan Diskominfo Provinsi Riau di berbagai sektor program untuk percepatan perkembangan isu-isu yang menyangkut e-government di OPD Pemprov Riau guna mendorong terwujudnya visi Diskominfotik dan Visi Riau umumnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Untuk mencapai prioritas pembangunan sebagaimana tertuang

dalam RKPD di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berupaya menunjang dalam aspek peningkatan dan pemantapan pembangunan ekonomi, berdaya saing, peningkatan sarana dan prasarana, pemantapan aparatur dan birokrasi pemerintahan, penguatan dan pembangunan infrastruktur.

RKPD Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa program dan kegiatan dari tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD, tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra OPD tahun 2014-2019, dan telah disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPД tahun 2019
Provinsi Riau**

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran baik	100 %	1,291,168,700	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran baik	100 %	1,291,168,700	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Riau	jumlah surat yang dikirim	160 Pengiriman	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Riau	jumlah surat yang dikirim	160 Pengiriman	10,000,000	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	86,175,200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	86,175,200	
3	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Riau	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Riau	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik	12 Bulan	25,000,000	
5	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Riau	Jumlah makan dan minum yang disediakan	8590 Porsi	210,095,000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Riau	Jumlah makan dan minum yang disediakan	8590 Porsi	210,095,000	
6	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi Riau dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	67 Kali	644.584.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi Riau dan Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	67 Kali	644.584.000	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Riau	Rentang Waktu Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Riau	Rentang Waktu Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12,000,000	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Provinsi	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan	2 orang 12 Bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Provinsi	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan	2 orang 12 Bulan	60,000,000	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	14 Unit	100,000,000	
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	50,097,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Riau	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	50,097,000	
11	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah Barang-barang Milik Daerah Dinas Kominfotik Riau	3 Dokumen	43,217,500	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah Barang-barang Milik Daerah Dinas Kominfotik Riau	3 Dokumen	43,217,500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 %	210,390,750	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100 %	210,390,750	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	4 Unit	75,440,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	4 Unit	75,440,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	144 Unit	46,450,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pekanbaru	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	144 Unit	46,450,000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	48,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	48,500,000	
4	Penyediaan Sarana Kearsipan	Riau	Jumlah Jenis Sarana Kearsipan	1682 Jenis	40,000,000	Penyediaan Sarana Kearsipan	Riau	Jumlah Jenis Sarana Kearsipan	1682 Jenis	40,000,000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya sumber daya ASN	100 %	268,374,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya sumber daya ASN	100 %	268,374,000	
1	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Riau	Jumlah ASN yang dibina fisik dan mental	70 Orang	121,000,000	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Riau	Jumlah ASN yang dibina fisik dan mental	70 Orang	121,000,000	
2	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah peserta Upacara Harkitnas	1,000 Orang	88,260,000	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah peserta Upacara Harkitnas	1,000 Orang	88,260,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pendidikan dan Pelatihan formal		Jumlah Dana	59,114,000	59,114,000	Pendidikan dan Pelatihan formal		Jumlah Dana	59,114,000	59,114,000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase ketepatan penyampaian laporan	100 %	168,663,600	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase ketepatan penyampaian laporan	100 %	168,663,600	
1	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Kabupaten	Jumlah peserta Rapat	70 orang		Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Kabupaten	Jumlah peserta Rapat	70 orang		
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan	28 Eksemplar	37,609,600	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan	28 Eksemplar	37,609,600	
3	Penyusunan RENSTRA SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	60 Eksemplar	32,554,000	Penyusunan RENSTRA SKPD	Pekanbaru	Jumlah Dokumen	60 Eksemplar	32,554,000	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Keuangan OPD	2 Dokumen	98,500,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Provinsi Riau	Jumlah Laporan Keuangan OPD	2 Dokumen	98,500,000	
V	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi		Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	Aparatur 424 orang, Masyarakat 3.096 orang	583,254,000	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi		Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	Aparatur 424 orang, masyarakat 3.096 orang	583,254,000	
1	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Provinsi Riau	jumlah kelompok informasi yang dibina	30 kelompok	50,000,000	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Provinsi Riau	jumlah kelompok informasi yang dibina	30 kelompok	50,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Teknis Persandian	12 Orang	122,386,000	Pengelolaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah	Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Teknis Persandian	12 Orang	122,386,000	
3	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Provinsi dan Kab/Kota	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1 Dokumen	114,882,000	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Provinsi dan Kab/Kota	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	1 Dokumen	114,882,000	
4	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Riau	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	6 Aplikasi dan 20 Titik	295,986,000	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Riau	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	6 Aplikasi dan 20 Titik	295,986,000	
VI	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa		130,000,000	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa		130,000,000	
1	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Provinsi Riau	Jumlah Pertemuan Lembaga Komunikasi se Prov. Riau	1 Kali	80,000,000	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Provinsi Riau	Jumlah Pertemuan Lembaga Komunikasi se Prov. Riau	1 Kali	80,000,000	
2	Dialog Interaktif melalui Media Televisi Lokal	Provinsi Riau	Jumlah Dialog Interaktif dan Iklan Layanan Masyarakat pada Televisi	1 Kali dan 30 Kali	50,000,000	Dialog Interaktif melalui Media Televisi Lokal	Provinsi Riau	Jumlah Dialog Interaktif dan Iklan Layanan Masyarakat pada Televisi	1 Kali dan 30 Kali	50,000,000	
VII	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika		Jumlah Jaringan infrastruktur Komunikasi dan informatika yang terpasang	54 Titik	2,145,274,800	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika		Jumlah Jaringan infrastruktur Komunikasi dan informatika yang terpasang	54 Titik	2,145,274,800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Data yang terintegrasi dan berbagi Pakai OPD di Pemprov riau hingga Kab/kota se Prov. Riau	OPD Pemprov dan Kab/kota	232,986,000	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Data yang terintegrasi dan berbagi Pakai OPD di Pemprov riau hingga Kab/kota se Prov. Riau	OPD Pemprov dan Kab/kota	232,986,000	
2	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Bandwidth Dedicated dan Broadband Up To akses Internet	350 Mbps (51 Titik Jaringan)	1,109,417,000	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Bandwidth Dedicated dan Broadband Up To akses Internet	350 Mbps (51 Titik Jaringan)	1,109,417,000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan	Prov. Riau	485,809,800	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana	Prov. Riau	485,809,800	
4	Pengembangan dan Pengelolaan Commad Center Prov. Riau	Riau	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	317,062,000	Pengembangan dan Pengelolaan Commad Center Prov. Riau	Riau	Jumlah Command Center yang dikelola	1 Unit	317,062,000	
VIII	Program Pengembangan Aplikasi Informatika		Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi	70 %	850,000,000	Program Pengembangan Aplikasi Informatika		Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi	70 %	850,000,000	
1	Pengembangan e-government Provinsi Riau		Tersedia Layanan Aplikasi yang generik dan Non generik	4 aplikasi	850,000,000	Pengembangan e-government Provinsi Riau		Tersedia Layanan Aplikasi yang generik dan Non generik	4 aplikasi	850,000,000	
IX	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	67 Unit	4,383,934,250	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	67 Unit	4,383,934,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan website riau.go.id	Riau	badan publik yang menyediakan layanan kominfo	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	163.000.000	Pengelolaan website riau.go.id	Riau	badan publik yang menyediakan layanan kominfo	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	163.000.000	
2	Layanan Informasi melalui media center	Riau	Jumlah Bilik Media Center yang dikelola / Jumlah Website Media Center yang di kelola	2 Bilik / 1 website	174.951.750	Layanan Informasi melalui media center	Riau	Jumlah Bilik Media Center yang dikelola / Jumlah Website Media Center yang di kelola	2 Bilik / 1 website	174.951.750	
3	Newsroom pemerintah provinsi riau	Riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	10 Berita/Hari	217.686.000	Newsroom pemerintah provinsi riau	Riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	10 Berita/Hari	217.686.000	
4	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1 Kali	50.000.000	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	1 Kali	50.000.000	
5	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang Diliput dan Didokumentasikan	150 acara/ kegiatan	880.530.000	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang Diliput dan Didokumentasikan	150 acara/ kegiatan	880.530.000	
6	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik dapat terlaksana	Provinsi Riau	1.946.933.600	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik dapat terlaksana	Provinsi Riau	1.946.933.600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Pekanbaru	Jumlah masyarakat dan aparatur pemdes yang memahami keterbukaan informasi publik	260 orang	285.858.900	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Pekanbaru	Jumlah masyarakat dan aparatur pemdes yang memahami keterbukaan informasi publik	260 orang	285.858.900	
8	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Meningkatnya Jumlah Penonton TV Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Masyarakat di Provinsi Riau	24.000.000	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Meningkatnya Jumlah Penonton TV Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Masyarakat di Provinsi Riau	24.000.000	
9	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	12 Kab/kota Se Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	12 Kabupaten/ Kota	230.452.000	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	12 Kab/kota Se Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	12 Kabupaten /Kota	230.452.000	
10	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	12 Kab/Kota	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	200 orang	410.522.000	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	12 Kab/Kota	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	200 orang	410.522.000	
X	Program Pengembangan Data/Informasi		Persentase ketersediaan data/informasi Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan	100 Persen ; 100 Persen	754.789.000	Program Pengembangan Data/Informasi		Persentase ketersediaan data/informasi Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan	100 Persen ; 100 Persen	754.789.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Layanan Informasi Melalui Media Center	Riau	persentase peningkatan pelayanan informasi pada media center	100%	-	Layanan Informasi Melalui Media Center	Riau	persentase peningkatan pelayanan informasi pada media center	100%	-	
2	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Dana	Rp. 217.686.000	-	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau	Riau	Jumlah Dana	Rp. 217.686.000	-	
3	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Tersedianya Data se Provinsi Riau	8 Kelompok Data	302.512.400	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Tersedianya Data se Provinsi Riau	8 Kelompok Data	302.512.400	
4	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah data yang di update dan diolah	8 Kelompok Data	321.383.600	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah data yang di update dan diolah	8 Kelompok Data	321.383.600	
5	Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Provinsi Riau	Terlaksananya Forum Data Sektoral Provinsi Riau	100%	130.893.000	Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Provinsi Riau	Terlaksananya Forum Data Sektoral Provinsi Riau	100%	130.893.000	
TOTAL					10,785,849,100	TOTAL					10,785,849,100

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mengikuti rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Tabel 2.5. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Provinsi Riau Tahun 2019

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah "mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat". Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang mengambil tema "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah".

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 adalah RKP tahun kelima pelaksanaan RPJMN V (2015-2019), memuat program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang bersifat multiyear atau on-going, memuat program yang menjadi pijakan kokoh untuk

memudahkan pekerjaan Pemerintah selanjutnya, yang mendapat mandat untuk memimpin Indonesia.

Adapun Tema RPJMN V (2015-2019) adalah :

"Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian berbasis keunggulan SDA, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat."

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-

2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan

melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 2019.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan Renja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 bagi setiap bagian/bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Diskominfo Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun Sasaran Renja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2019 adalah :

1. Optimalnya peran komunikasi dan informatika dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019 sehingga terjadi sinergitas Tupoksi Diskominfo sebagai pengelola komunikasi, informatika dan Statistik dengan RPJMD Provinsi Riau serta Renstra Diskominfo Provinsi Riau;
2. Tersusunnya program dan kegiatan dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Diskominfo Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Diskominfo Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau, faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2019 pada

SKPD Diskominfo Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2019 :

1. Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur.
2. Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan.

Pada Lampiran III Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 24/SE/2018, Tanggal 9 Februari 2018 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, bahwa Pagu Indikatif Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.054.351.600,00,-

Sedangkan dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Diskominfo Provinsi Riau untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.785.849.100,00,-

Selisih ini terjadi karena ada penambahan dana dari hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Edaran Nomor 15/SE/2018, Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Tertib Pendanaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 218/SE/2017 Tanggal 24 Oktober 2017, Tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip, yang mana diharapkan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar mengalokasikan pendanaan untuk penyelenggaraan kearsipan pada tahun anggaran 2019 sekurang-kurangnya Rp. 40.000.000,-

2. Adanya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD sebesar : Rp. 98.500.000,- sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 42/SE/2018 Tanggal 8 Maret 2018 Tentang Pengalihan Tenaga Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3. Adanya kegiatan dari Komisi Informasi dengan dana sebesar : Rp. 1.592.997.500,-

Program-Program Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2019 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
7. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
8. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
9. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
10. Program Pengembangan Data/Informasi

Adapun rincian rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**TABEL 3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI RIAU
TAHUN 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				1.938.597.050,00				4.007.798.000,00
1.02.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100 Persen	1.291.168.700,00				2.386.318.000,00
1.02.1.02.10.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	Riau	160 Pengiriman	10.000.000,00		-	160 Pengiriman	12.700.000,00
1.02.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Riau	12 Bulan	12.000.000,00		-	12 Bulan	12.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara.	Riau	14 unnit	100.000.000,00		-	18 unnit	362.600.000,00
1.02.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Riau	12 Bulan	50.097.000,00		-	12 Bulan	150.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Riau	12 Bulan	86.175.200,00		-	12 Bulan	300.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Riau	12 Bulan	50.000.000,00		-	12 Bulan	275.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Riau	12 Bulan	25.000.000,00		-	12 Bulan	139.693.000,00
1.02.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Riau	8.590 Porsi	210.095.000,00		-	8.590 Porsi	232.325.000,00
1.02.1.02.10.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Riau	67 Kali	644.584.000,00		-	67 Kali	792.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.10.01.01.023.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Provinsi	2 orang, 12 bulan	60.000.000,00		-	2 orang, 12 bulan	60.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.110.	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Barang-Barang Milik Daerah Dinas Kominfotik Riau	-	3 Dokumen	43.217.500,00		-	6 Dokumen	50.000.000,00
1.02.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100 Persen	210.390.750,00				481.400.000,00
1.02.1.02.10.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Pekanbaru	4 Unit	75.440.750,00		-	4 Unit	199.100.000,00
1.02.1.02.10.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperlihara	Pekanbaru	144 Unit	46.450.000,00		-	500 Unit	193.800.000,00
1.02.1.02.10.01.02.080.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	3 Unit	48.500.000,00		-	3 unit	48.500.000,00
1.02.1.02.10.01.02.199.	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah jenis sarana kearsipan	Riau	1682 Jenis	40.000.000,00		-	1682 Jenis	40.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		100 Persen	268.374.000,00				916.580.000,00
1.02.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Dana	-	59.114.000	59.114.000,00		-	-	350.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05.012.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan Mental	Riau	70 Orang	121.000.000,00		-	100 Orang	300.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05.020.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	Riau	1.000 Orang	88.260.000,00		-	1.000 Orang	266.580.000,00
1.02.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentas ketepatan Penyampaian Laporan		100 Persen	168.663.600,00				223.500.000,00
1.02.1.02.10.01.06.005.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	Pekanbaru	28 Eksemplar	37.609.600,00		-	90 Eksemplar	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.10.01.06.006.	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	Kabupaten Siak	70 orang	-		-	70 orang	-
1.02.1.02.10.01.06.030.	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	60 Eksemplar	32.554.000,00		-	70 Eksemplar	50.000.000,00
1.02.1.02.10.01.06.120.	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan PPKD	Provinsi Riau	2 Dokumen	98.500.000,00		-	2 Dokumen	98.500.000,00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.092.463.050,00				16.427.519.200,00
1.02.10.1.02.10.01.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Jumlah masyarakat yang memahami komunikasi dan informatika Jumlah aparatur yang memahami komunikasi dan informatika		Aparatur : 424 Orang ; Masyarakat : 3.096 Orang	583.254.000,00				1.650.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.003	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi yang dibina	Provinsi Riau	30 Kekompok	50.000.000,00		-	100 kelompok di 12 kab/kota	850.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.027	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga teknis persandian	Provinsi dan Kab/Kota	12 orang	122.386.000,00		-	20 orang	150.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.028	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen	114.882.000,00		-	1 dokumen	250.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.029	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	Riau	6 aplikasi dan 20 titik	295.986.000,00		-	10 aplikasi dan 30 titik	400.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Jumlah Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		145 Kali	130.000.000,00				1.450.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.007	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah pertemuan lembaga komunikasi se provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Kali	80.000.000,00		-	3 Kali	650.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.1.02.10.01.18.016	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	Jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat pada televisi	Provinsi Riau	1 kali dan 30 kali	50.000.000,00		-	10 kali dan 50 kali	800.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terpasang		54 Titik Jaringan	2.145.274.800,00				3.210.052.200,00
1.02.10.1.02.10.01.19.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat jaringan	Riau	Provinsi Riau	485.809.800,00		-	Provinsi Riau	1.709.871.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.002	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Bandwidth Dedicated dan Broadband Up to Akses Internet	Riau	350 Mbps (51 titik jaringan)	1.109.417.000,00		-	350 Mbps (51 titik jaringan)	2.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.010	Pengembangan dan Pengelolaan Comman Center Provinsi Riau	Jumlah Command Center yang dikelola	Riau	1 Unit	317.062.000,00		-	1 Unit	717.949.200,00
1.02.10.1.02.10.01.19.012	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Data yang terintegrasi dan berbagi pakai OPD di Pemprov riau hingga Kab/Kota se Povinsi Riau	Riau	OPD Pemprov dan Kab/Kota	232.986.000,00		-	OPD Pemprov dan Kab/Kota	780.232.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi informatika		70 Persen	850.000.000,00				3.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001	Pengembangan e-government Provinsi Riau	Tersedia layanan aplikasi yang generik dan non generik	-	4 Aplikasi	850.000.000,00		-	5 Aplikasi	3.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat		67 Unit	4.383.934.250,00				7.117.467.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.1.02.10.01.21.001	Pengelolaan website riau.go.id	badan publik yang menyediakan layanan kominfo	Riau	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	163.000.000,00		-	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	250.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.006	Layanan Informasi melalui media center	Jumlah Bilik Media Center yang dikelola / Jumlah Website Media Center yang di kelola	Riau	2 Bilik / 1 website	174.951.750,00		-	2 Bilik / 1 website	532.344.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.007	Newsroom pemerintah provinsi riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	Riau	10 Berita/Hari	217.686.000,00		-	48 Berita/Hari	901.219.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.008	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	Riau	1 Kali	50.000.000,00		-	1 Kali	192.930.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.010	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang Diliput dan Didokumentasikan	Provinsi Riau	150 acara/kegiatan	880.530.000,00		-	250 acara/kegiatan	1.200.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.011	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik dapat terlaksana	Provinsi Riau	Provinsi Riau	1.946.933.600,00		-	Provinsi Riau	2.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.017	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah masyarakat dan aparatur pemdes yang memahami keterbukaan informasi publik	Pekanbaru	260 orang	285.858.900,00		-	350 orang	550.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.019	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Meningkatnya Jumlah Penonton TV Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Masyarakat di Provinsi Riau	24.000.000,00		-	Masyarakat di Provinsi Riau	850.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.028	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	12 Kab/kota Se Provinsi	12 Kabupaten/Kota	230.452.000,00		-	12 Kabupaten/Kota	230.452.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.1.02.10.01.21.032	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	12 Kab/Kota	200 orang	410.522.000,00		-	200 orang	410.522.000,00
3.00.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				754.789.000,00				1.750.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan		100 Persen ; 100 Persen	754.789.000,00				1.750.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.080	Layanan Informasi Melalui Media Center	persentase peningkatan pelayanan informasi pada media center	Riau	100%	-		-	100%	-
3.00.01.1.02.10.01.15.081	Newsroom Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dana	Riau	Rp. 217.686.000	-		-	Rp. 901.219.000	-
3.00.01.1.02.10.01.15.088	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Tersedianya Data se Provinsi Riau	Provinsi Riau	8 Kelompok Data	302.512.400,00		-	8 Kelompok Data	450.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.089	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Jumlah data yang di update dan diolah	Provinsi Riau	8 Kelompok Data	321.383.600,00		-	8 Kelompok Data	800.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.090	Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Terlaksananya Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Provinsi Riau	100%	130.893.000,00		-	100%	500.000.000,00
TOTAL					10.785.849.100,00				22.185.317.200,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau tertuang dalam Rencana Program/kegiatan Prioritas Daerah seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1 (Tabel T- C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	10	11
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				1.938.597.050,00			4.152.368.000,00
1.02.1.02.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100 Persen	1.291.168.700,00			2.386.318.000,00
1.02.1.02.10.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang dikirim	Riau	160 Pengiriman	10.000.000,00	-	160 Pengiriman	12.700.000,00
1.02.1.02.10.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Riau	12 Bulan	12.000.000,00	-	12 Bulan	12.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara.	Riau	14 unnit	100.000.000,00	-	18 unnit	362.600.000,00
1.02.1.02.10.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Riau	12 Bulan	50.097.000,00	-	12 Bulan	150.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Riau	12 Bulan	86.175.200,00	-	12 Bulan	300.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Riau	12 Bulan	50.000.000,00	-	12 Bulan	275.000.000,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.10.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Riau	12 Bulan	25.000.000,00	-	12 Bulan	139.693.000,00
1.02.1.02.10.01.01.017.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Riau	8.590 Porsi	210.095.000,00	-	8.590 Porsi	232.325.000,00
1.02.1.02.10.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Riau	67 Kali	644.584.000,00	-	67 Kali	792.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.023.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Provinsi	2 orang, 12 bulan	60.000.000,00	-	2 orang, 12 bulan	60.000.000,00
1.02.1.02.10.01.01.110.	Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Barang-Barang Milik Daerah Dinas Kominfotik Riau	-	3 Dokumen	43.217.500,00	-	6 Dokumen	50.000.000,00
1.02.1.02.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100 Persen	210.390.750,00			481.400.000,00
1.02.1.02.10.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Pekanbaru	4 Unit	75.440.750,00	-	4 Unit	150.000.000,00
1.02.1.02.10.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diperlihara	Pekanbaru	144 Unit	46.450.000,00	-	500 Unit	200.000.000,00
1.02.1.02.10.01.02.080.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Pekanbaru	3 Unit	48.500.000,00	-	3 unit	235.970.000,00
1.02.1.02.10.01.02.199.	Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah jenis sarana kearsipan	Riau	1682 Jenis	40.000.000,00	-	1682 Jenis	40.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara		100 Persen	268.374.000,00			916.580.000,00
1.02.1.02.10.01.05.001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Dana	-	59.114.000	59.114.000,00	-	-	350.000.000,00
1.02.1.02.10.01.05.012.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang dibina fisik dan Mental	Riau	70 Orang	121.000.000,00	-	100 Orang	300.000.000,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.10.01.05.020.	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta upacara Harkitnas	Riau	1.000 Orang	88.260.000,00	-	1.000 Orang	266.580.000,00
1.02.1.02.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan penyampaian laporan		100 Persen	168.663.600,00			223.500.000,00
1.02.1.02.10.01.06.005.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	Pekanbaru	28 Eksemplar	37.609.600,00	-	90 Eksemplar	75.000.000,00
1.02.1.02.10.01.06.006.	Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	Kabupaten Siak	70 orang	-	-	70 orang	-
1.02.1.02.10.01.06.030.	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Jumlah Dokumen	Pekanbaru	60 Eksemplar	32.554.000,00	-	70 Eksemplar	50.000.000,00
1.02.1.02.10.01.06.120.	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD dan PPKD	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Provinsi Riau	2 Dokumen	98.500.000,00	-	2 Dokumen	98.500.000,00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.092.463.050,00			16.427.519.200,00
1.02.10.1.02.10.01.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Jumlah masyarakat yang memahami komunikasi dan informatika Jumlah aparatur yang memahami komunikasi dan informatika		Aparatur : 424 Orang ; Masyarakat : 3.096 Orang	583.254.000,00			1.650.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.003	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kelompok informasi yang dibina	Provinsi Riau	30 Kekompok	50.000.000,00	-	100 kelompok di 12 kab/kota	850.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.027	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga teknis persandian	Provinsi dan Kab/Kota	12 orang	122.386.000,00	-	20 orang	150.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.028	Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMMI)	Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen	114.882.000,00	-	1 dokumen	250.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.17.029	Penyelenggaraan Kontra Penginderaan Untuk Pengamanan Informasi Pimpinan di Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang di assesment dan pengamanan informasi pada objek vital dilingkungan pemerintah daerah	Riau	6 aplikasi dan 20 titik	295.986.000,00	-	10 aplikasi dan 30 titik	400.000.000,00

1	2	3	4	5	6	8	10	11
1.02.10.1.02.10.01.18.	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Jumlah Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		145 Kali	130.000.000,00			1.450.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.007	Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi	Jumlah pertemuan lembaga komunikasi se provinsi Riau	Provinsi Riau	1 Kali	80.000.000,00	-	3 Kali	650.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.18.016	Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal	Jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat pada televisi	Provinsi Riau	1 kali dan 30 kali	50.000.000,00	-	10 kali dan 50 kali	800.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan infrastruktur komunikasi dan informatika yang terpasang		54 Titik Jaringan	2.145.274.800,00			3.210.052.200,00
1.02.10.1.02.10.01.19.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat jaringan	Riau	Provinsi Riau	485.809.800,00	-	Provinsi Riau	1.709.871.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.002	Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Bandwidth Dedicated dan Broadband Up to Akses Internet	Riau	350 Mbps (51 titik jaringan)	1.109.417.000,00	-	350 Mbps (51 titik jaringan)	2.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.19.010	Pengembangan dan Pengelolaan Command Center Provinsi Riau	Jumlah Command Center yang dikelola	Riau	1 Unit	317.062.000,00	-	1 Unit	717.949.200,00
1.02.10.1.02.10.01.19.012	Pengelolaan Data Center Pemerintah Provinsi Riau	Data yang terintegrasi dan berbagi pakai OPD di Pemprov Riau hingga Kab/Kota se Povinsi Riau	Riau	OPD Pemprov dan Kab/Kota	232.986.000,00	-	OPD Pemprov dan Kab/Kota	780.232.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi informatika		70 Persen	850.000.000,00			3.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.20.001	Pengembangan e-government Provinsi Riau	Tersedia layanan aplikasi yang generik dan non generik	-	4 Aplikasi	850.000.000,00	-	5 Aplikasi	3.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah badan publik yang menyediakan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat		67 Unit	4.383.934.250,00			7.117.467.000,00

1	2	3	4	5	6	8	10	11
1.02.10.1.02.10.01.21.001	Pengelolaan website riau.go.id	badan publik yang menyediakan layanan kominfo	Riau	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	163.000.000,00	-	Terciptanya Pengembangan dan Pengelolaan Website riau.go.id	250.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.006	Layanan Informasi melalui media center	Jumlah Bilik Media Center yang dikelola / Jumlah Website Media Center yang di kelola	Riau	2 Bilik / 1 website	174.951.750,00	-	2 Bilik / 1 website	532.344.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.007	Newsroom pemerintah provinsi riau	Jumlah berita yang dipublikasikan melalui website	Riau	10 Berita/Hari	217.686.000,00	-	48 Berita/Hari	901.219.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.008	Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau	Jumlah pameran yang dilaksanakan	Riau	1 Kali	50.000.000,00	-	1 Kali	192.930.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.010	Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Acara Yang Diliput dan Didokumentasikan	Provinsi Riau	150 acara/kegiatan	880.530.000,00	-	250 acara/kegiatan	1.200.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.011	Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau	Pelayanan terhadap penyelesaian sengketa informasi publik dapat terlaksana	Provinsi Riau	Provinsi Riau	1.946.933.600,00	-	Provinsi Riau	2.000.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.017	Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Jumlah masyarakat dan aparatur pemdes yang memahami keterbukaan informasi publik	Pekanbaru	260 orang	285.858.900,00	-	350 orang	550.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.019	Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Meningkatnya Jumlah Penonton TV Streaming Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Masyarakat di Provinsi Riau	24.000.000,00	-	Masyarakat di Provinsi Riau	850.000.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.028	Pembinaan PPID di Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	12 Kab/kota Se Provinsi	12 Kabupaten/Kota	230.452.000,00	-	12 Kabupaten/Kota	230.452.000,00
1.02.10.1.02.10.01.21.032	Pembinaan Pemahaman Aparatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Aparatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memahami keterbukaan informasi publik	12 Kab/Kota	200 orang	410.522.000,00	-	200 orang	410.522.000,00

1	2	3	4	5	6	8	10	11
3.00.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				754.789.000,00			1.750.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data/informasi Persentase ketersediaan data sektoral per kewenangan urusan		100 Persen ; 100 Persen	754.789.000,00			1.750.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.088	Identifikasi, Sinkronisasi, Integrasi Data Sektoral Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Tersedianya Data se Provinsi Riau	Provinsi Riau	8 Kelompok Data	302.512.400,00	-	8 Kelompok Data	450.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.089	Update dan Pengolahan Data Sektoral Pemerintah Daerah se- Provinsi Riau	Jumlah data yang di update dan diolah	Provinsi Riau	8 Kelompok Data	321.383.600,00	-	8 Kelompok Data	800.000.000,00
3.00.01.1.02.10.01.15.090	Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Terlaksananya Forum Data Sektoral Provinsi Riau	Provinsi Riau	100%	130.893.000,00	-	100%	500.000.000,00
TOTAL					10.785.849.100,00			22.329.887.200,00

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada Tahun 2019.